

Membangkitkan Indonesia: Koalisi Antar-Agama Melawan Korupsi dan Kemiskinan

Zuly Qodir

Religion as a source of our rule and guidance shows us the good from the bad, the truth from the false. Our recent problem, especially in Indonesia is an opinion that corruption seems not as a crime. As a part of a nation, as NGO, government, all people have to declare that corruption is a crime and corruptor is a criminal offender. The better interpretation should be made for internalizing religious values to the people, because so far, good knowledge about religion doesn't mean the ability to prevent someone from corruption. We should together build a system which strictly prevents us from corruption from the small to the bigger level, not just through moral prevention but also using very strict legal system to overcome this problem.

Kita sebagai umat manusia adalah satu umat. Sebagaimana al-Quran menegaskan hal ini, bahwa kita adalah satu umat. "Manusia adalah satu umat. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para Nabi sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan beserta mereka, Ia turunkan Kitab-kitab dengan benar, supaya Dia bisa memberi keputusan antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. (Quran: 2: 213).

Itulah penegasan Kitab Suci al-Quran tentang umat manusia. Sehingga pengakuan akan pluralisme merupakan ungkapan paling ringkas yang dapat menggambarkan suatu tatanan baru, dalam sebuah dunia baru dimana perbedaan budaya, sistem kepercayaan, dan nilai-nilai membangkitkan gairah pelbagai ungkapan manusia yang tak kunjung habis sekaligus memberikan ilham bagi konflik-konflik yang tak bisa diabaikan. Agama-agama karena itu, pada satu pihak dapat dikatakan sebagai "sumber inspirasi"

untuk mengatur dunia baru, tetapi sekaligus dapat menjadi sumber disintegrasi bangsa, sebab menumbuhkan konflik berkepanjangan, perasaan "tinggi hati" serta sentimen yang berlebihan. Disinilah agama menjadi pedang bermata dua; yang keduanya sama-sama tajam.

Menyadari akan kondisi agama yang semacam itu, sebagai umat beriman, kita tentu harus mampu merumuskan hal-hal baru yang dapat menjadikan titik perekat atau titik temu antarumat beragama sehingga agama menjadi "sumber inspirasi" dalam memberikan jawaban-jawaban atas masalah-masalah yang timbul di muka bumi. Sekurang-kurangnya agama mampu menjadi *integrating factors*, antarmanusia, ketimbang menjadi *dis-integrating factors*, sebab jika faktor kedua yang menguat, maka antarumat beragama akan sibuk dengan "urusannya masing-masing" dalam memenangkan pertempuran yang acapkali terbungkus dengan dogma suci.

Kita dapat menyaksikan betapa agama seringkali menjadi *disintegrating factors*, pada saat agama-agama dianggap tidak mampu memberikan jawaban-jawaban pasti dalam merespon problem besar. Problem-problem bangsa seperti korupsi, kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan distribusi dan bencana alam tidak kurang-kurangnya dapat mendorong timbulnya semangat religiusitas yang berlebihan sehingga menganggap apa yang dikerjakan oleh Negara atau kelompok agama lainnya hanya sebagai "cara" melakukan pengagamaan atas kelompok agama yang lainnya.

Membela Tuhan seakan-akan menjadi kata kunci dalam gerakan keagamaan yang mencoba memberikan "tawaran konkret" akan problem yang dihadapi umat beragama. Kita coba ingat kembali peristiwa awal Januari 2002 yang cukup menegangkan dalam hal hubungan antaragama di negeri ini, sebab stigma agama (Islam) ketika itu benar-benar berada pada titik nadir yang nyaris disamakan dengan "agama terorisme" oleh dunia internasional. Beruntunglah NU dan Muhammadiyah segera melakukan klarifikasi internasional, sehingga citra Islam di muka internasional, tidak sebagai-mana tergambar pada para "pembela Tuhan" yang sejatinya masih sangat *debatable*, sebab "pembela Tuhan" tidak harus berarti dengan kekerasan atau dengan cara-cara yang menodai prinsip rahman dan rahim dari ajaran Islam itu sendiri.

Pada saat sekelompok umat beragama (khususnya kelompok Islam) mengharapkan jawaban-jawaban pasti, konkret dan sekarang, sehingga menyebabkan kelompok tersebut berbuat nekat, hitam putih dan kadang merasa benar sendiri karena "membela Tuhan", Muhammadiyah dan NU dua organisasi Islam terbesar di negeri ini tampil untuk secara tegas

menetralisir sikap-sikap galak dari sekelompok umat beragama tersebut yang mengatasnamakan Islam. Orang Islam yang berpikiran serba hitam putih, linear dan paralel, sebenarnya disebabkan karena sistem hukum yang tidak adil, kesejahteraan yang tidak tercapai, dan keadilan tidak ditegakkan sehingga persatuan bangsa yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa gagal dibangun. Prof. A. Syafii Maarif secara eksplisit pernah menyatakan, bahwa keinginan beberapa daerah memperjuangkan tegaknya Syariat Islam tidak lebih karena nilai-nilai luhur kemanusiaan Islam seperti keadilan dan kemanusiaan tidak terwujud di tengah masyarakat. (Kompas, 3 Januari 2002)

Tampilnya Muhammadiyah dan NU dengan upaya mencegah anggapan bahwa Islam merupakan agama yang bengis, galak, penuh kekerasan dan penindasan sehingga menakutkan orang-orang yang beragama lain, sekalipun sesungguhnya Islam bukanlah agama yang mengajarkan kebengisan, kekerasan dan perlakuan diskriminatif karena Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin* merupakan jalan yang sangat tepat. Mengingat dua organisasi ini merupakan organisasi sosial keagamaan yang sangat besar jamaahnya dan sangat luas pengaruhnya di seluruh negeri ini. Dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* yang digagas Muhammadiyah dan NU adalah dakwah yang mensinergikan antara *amar ma'ruf* (menyuruh kebaikan), dan *nahi munkar* (mencegah kemungkaran), bukan terpisah sendiri-sendiri, demikian ditegaskan kedua tokoh puncak organisasi Islam terbesar di nusantara ini. (Kompas, 3 Januari, 2002)

Berkaitan dengan hal tersebut, safari ketua PB NU KH. Hasyim Muzadi ketika itu ke AS, dimana seharusnya bersama ketua PP Muhammadiyah A. Syafii Maarif,

namun batal karena Prof. Syafii sedang menjalankan ibadah haji, sehingga kiai Hasyim ditemani ketua PBNU lainnya, A. Mustofa Zuhad untuk bertemu presiden George W. Bush atas undangan Dewan Keamanan AS sangat strategis. Kiai Hasyim berniat mengkampanyekan bahwa Islam Indonesia adalah Islam moderat, tidak sebagaimana digambarkan atau dilihat dalam stasiun televisi atau media massa cetak. Bahkan Muzadi menjelaskan bahwa Islam moderat merupakan kekuatan yang riil dalam politik Indonesia bersama kaum nasionalis dan TNI. (Jawa Pos, 7 Februari 2002)

Dengan mengkampanyekan kekuatan Islam yang berkembang adalah kekuatan Islam moderat, maka Kiai Hasyim hendak meminta pada AS untuk lebih mengutamakan pendekatan *cultural-religius*, ketimbang cara-cara kekerasan dalam rangka memerangi jaringan terorisme yang hendak merambah Indonesia. Cara-cara *cultural-religius* ini dianggap kiai Hasyim sebagai alternatif pemecahan masalah yang lebih substansial, sehingga kebencian masyarakat Indonesia terhadap AS akan berkurang. (Kompas, 6 Februari, 2002)

Sebuah forum yang digelar di Jakarta, beberapa waktu lalu, di mana di sana hadir 10 duta besar negara barat dan 3 duta besar negara Islam sebenarnya berupaya menepis anggapan adanya terorisme yang berbasis agama. Dalam forum bertema *Islam and the West Working Together for a Peacefull World* yang diselenggarakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 26 Maret 2002 membahas tentang perlunya kerjasama antara Islam dan Barat dalam mewujudkan perdamaian. Pembicara sepakat sebenarnya tidak ada terorisme berbasis agama. Duta besar Inggris, Richard Gozney secara tegas tidak sepakat apabila peristiwa 11 September sebagai teroris yang dilakukan

oleh umat Islam. Peristiwa tersebut dilakukan oleh orang yang tidak beragama, karena yang mereka lakukan adalah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Memerangi teroris adalah tugas kita bersama, orang yang mencintai perdamaian, beragama dan memiliki hati nurani karena perbuatan teroris merupakan perbuatan yang mengancam kemanusiaan, mengancam kebebasan manusia, oleh sebab itu yang perlu dikembangkan adalah dialog dan kerjasama, demikian dikemukakan Dubes Amerika Serikat Ralph L. Boyce. (Kompas, 27/3/2002) Forum ini menarik dan strategis berhubung belakangan sedang ramai dibahas tentang terorisme internasional.

Pada tahun 2003, 15 Oktober NU-Muhammadiyah kembali melakukan kerjasama dalam proyek besar koalisi untuk memberantas korupsi. NU-Muhammadiyah terpanggil untuk turut serta dalam pemberantasan korupsi di negeri ini, sebab negeri ini merupakan negeri terkorup di Asia dan peringkat empat di seluruh dunia, sebagaimana pernah dilaporkan oleh sebuah lembaga survey independen dari Hongkong, Januari 2003 dan Januari 2004 dari hasil survei 1000 pebisnis oleh *Political and Economic Risk Consultancy*, Indonesia kembali menempati rangking pertama dalam hal korupsi.

Bukti-bukti mental korup ternyata nyata di depan mata kita sebagai umat beragama. Bahkan, anggota dewan (legislatif) beberapa daerah, termasuk Sumatera Barat adalah rangking tertinggi dalam hal korupsi. Hasilnya, 43 Anggota DPRD Sumbar harus divonis hukuman penjara, sebuah vonis yang patut dihormati. Selain DPRD Sumbar, anggota dewan yang korupsi adalah 30 anggota DPRD kota Cirebon, 2 Anggota DPRD NAD, Seluruh Anggota DPRD Kab. Ciamis, 9 Anggota DPRD kab. Pontianak

dan seterusnya. Ini sungguh mengerikan sekaligus memalukan, sebab mereka seringkali dianggap mewakili rakyat, dan saya kira beragama, namun tidak bermoral.

Humanisasi Teologi

Untuk keperluan tulisan ini, saya tidak akan mendiskusikan tentang sepak terjang kedua organisasi sosial keagamaan (Muhammadiyah dan NU) dan sepak terjang Anggota Dewan yang korup, semoga mereka sudah diganti dan tidak dipilih kembali pada Pemilu 5 April lalu, tetapi hendak mengajak kepada kita umat beragama secara sadar dan rela untuk bersungguh-sungguh mencoba mengedepankan dimensi humanis dari agama-agama sehingga agama di Indonesia pada akhirnya lebih mencerminkan dimensi kemanusiaan ketimbang dimensi ritual simboliknya, yang memang terkadang berbeda-beda formasinya, tetapi sangat dimungkinkan terdapat kesamaan-kesamaan dalam wilayah substansinya. Hal ini sangat penting dilakukan berhubung belakangan, dengan menengok (kilas balik) tahun 2001 sangat sering terjadi dan dipertontonkan kepada kita kekerasan, kebengisan, dan ketidakadilan atas nama agama. Pada tahun 2004 ini dan tahun-tahun mendatang, kita berharap tidak lagi terjadi tindakan-tindakan yang sesungguhnya mendeskreditkan agama itu sendiri, sekalipun kelihatannya membela agama yang dianutnya dengan cara-cara kekerasan.

Sejak peristiwa 11 September 2001 yang lalu, memang isu tentang terorisme menjadi bagian dari masyarakat kita, apalagi dari negeri ini terdapat beberapa orang yang dituduh menjadi jaringan dari gembong "terorisme" Internasional, dimana ada hubungannya dengan Al-Qaeda di Pakistan pimpinan Osama bin Laden yang negerinya

telah diluluhlantakkan oleh Amerika bersama sekutunya. Goci, salah seorang yang pernah belajar di Ponpes Al-Mukmin Ngruki, Surakarta di tangkap di Filipina dengan tuduhan hendak melakukan pengeboman beberapa tempat umum dan perkantoran di Filipina, seperti kedutaan AS. Bahkan, sejak tertangkapnya Faturrahman Al Ghozi (Goci, sekarang sudah ditembak mati oleh polisi Filipina) ustadz Abu Bakar Ba'asir (sekarang dalam proses hukum di tanah air) selaku pengasuh pondok pesantren Al-Mukmin dituduh memiliki hubungan dengan beberapa aksi teroris yang dilakukan di beberapa negara di Asia.

Berkaitan dengan itu, menteri Senior Singapura Lee Kuan Yew bahkan secara terang-terangan menuduh Indonesia sebagai "sarang teroris", sehingga sangat riskan bagi negara-negara lain yang hendak menanamkan investasi, karena keamanan tidak bisa terjamin. (Kompas, 7 Februari, 2002, Jawa Pos, 6-7 Februari 2002). Memang akhirnya tuduhan Lee Kuan Yew mendapatkan tanggapan serius dari pejabat resmi pemerintah Indonesia, dan sekarang telah mulai mereda. Namun banyak pelajaran yang dapat diambil dari hal tersebut.

Tuduhan Lee agaknya diarahkan pada Islam, dimana dalam Islam disinyalir terdapat kelompok yang dianggap fundamentalis-radikal, sehingga tidak mengenal kompromi-kompromi terhadap siapapun. Tampak pernyataan tersebut tidak disenangi oleh kalangan muslim Indonesia, juga birokrasi. Kelompok Islam yang dituduh Lee merupakan kelompok Islam yang dianggap lebih menyukai aksi kekerasan fisik, maupun teror ketimbang aksi yang mendukung perdamaian adalah kelompok Islam radikal-fundamentalis. Disinilah sebenarnya masalah yang pelik, yang harus juga mampu dijelaskan kepada pihak-pihak yang memang memiliki pandangan "lain"

tentang Islam, termasuk Islam di Indonesia. Azyumardi Azra, dengan tegas pernah menyatakan bahwa fundamentalisme Islam Indonesia telah lama ada, sehingga memang merupakan fenomena yang bukan barang baru dalam gerakan keagamaan. Namun demikian, gerakan Islam fundamentalis ini menurut rektor UIN Syarif Hidayatullah ini tidak akan berkembang pesat di Indonesia, karena masih akan diimbangi oleh gerakan kelompok Islam moderat dan liberal. (Kompas, 24 Maret 2002)

Tentang fundamentalisme agama, sebenarnya tidak hanya menjadi "milik" kelompok Islam, tetapi juga dalam Kristen, Yahudi, maupun yang lain, Hindu misalnya.¹ Radikalisme di Indonesia tidak ada hubungannya dengan jaringan terorisme internasional, tetapi radikalisme muncul akibat persoalan ekonomi yang membelit mereka, termasuk soal pengangguran. Oleh sebab itu, untuk memutus munculnya radikalisme, dibutuhkan alternatif yang jelas sehingga pengangguran dapat dikurangi, demikian dikemukakan Wapres Hamzah Haz, ketika berbicara kepada senator Amerika Serikat, Daniel K. Inouye dan Ted Steven di Jakarta. (Kompas, 1 April 2002)

Barangkali memang benar bahwa agama diyakini oleh sebagian umatnya karena memberikan harapan-harapan tentang kehidupan di masa depan/mendatang yang lebih baik ketimbang kehidupan sekarang dan saat ini di dunia, dimana keculasan, tipu muslihat dan saling tikam/baku bunuh senantiasa bergentayangan di depan mata.² Tentu kita tidak rela apabila ketidakadilan, keculasan, tipu muslihat terus menerus terjadi dan menimpa bangsa ini, tetapi "melawan" semua itu dengan cara-cara kekerasan dan ingin menang sendiri juga sama buruknya. Apa yang dilakukan dengan demikian sebenarnya sama dengan apa yang telah

terjadi berkepanjangan di tanah air kita, sehingga akan memperparah dan memperpanjang daftar kekumuhan dan

¹ Armstrong menjelaskan, disebabkan karena penemuan dunia (masyarakat) modern atas prestasi-prestasinya, pada saat yang sama terdapat pihak-pihak yang merasa mengalami kekosongan dan kehampaan, sehingga membuat hidup tak berarti; sebagian mendambakan kepastian di tengah kehidupan yang penuh ketidakpastian dan kebingungan modernitas; sebagian melemparkan kecemasan-kecemasan atas kehidupan kepada musuh-musuh imajiner dan mengkhayalkan adanya persekongkolan universal. Armstrong dengan tegas menyatakan bahwa "gerakan resistensi terdapat paling tidak pada tiga agama monoteisme sepanjang peradaban modern. Karen Armstrong, *The Battle for God*, New York: 2000. hlm. 209-438. Mengenai fundamentalisme Hindu, dapat dilihat dalam karangan Rosario Narchison, *Toward a Definition of Fundamentalism Reconsidered*, 1991. Juga karya yang diedit oleh Asvid Sharma, *Our Religion*, 1994. Sementara itu, Mark Juergensmeyer, mencoba mengelaborasi gerakan-gerakan radikal di kalangan Islam, Kristen dan Hindu (Sikh) yang seringkali menggunakan kekerasan-kekerasan dalam aksinya sebagai bentuk dari teror "atas nama Tuhan". Lihat, Mark Juergensmeyer, *Terror in The Mind of God*, University of California Press, 2000.

² Sebagai contoh tentang masalah ini bisa kita saksikan bagaimana pengajian-pengajian, ceramah agama yang digelar di televisi pada saat bulan Ramadhan untuk umat Islam mendapat sambutan yang hangat, sehingga bisa dikesankan bahwa televisi menjadi "Islam", dengan segala macam iklan suatu produk tertentu, baik makanan, alat kecantikan, jamu kuat, sampai busana (*fashion*). Selain itu, betapa suatu kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh Anand Khrisna, banyak mendapat perhatian dan pengikut, sekaligus buku-bukunya yang diterbitkan oleh penerbit Gramedia, pernah menjadi best seller, sebelum akhirnya "diserang" oleh kelompok tertentu yang merasa apa yang dilakukan Anand Khrisna

coreng morengnya umat beragama itu sendiri.

Oleh sebab itulah, tindakan ingin menang sendiri, merasa benar sendiri (paling benar), tidak menghormati orang yang berbeda-beda agama, suku dan etnis sungguh harus dihilangkan jauh-jauh. Jika tidak dihilangkan, saya khawatir kekerasan dengan mengatasmamakan agama tertentu pada tahun 2002 ini dan tahun selanjutnya bukan berkurang, tetapi semakin menjadi-jadi. Kita umat beragama harus sadar dan waspada. Memang tetap akan selalu ada sekelompok orang atau umat yang berbeda dengan pikiran dan pandangan kita sehingga bertindak berbeda, tetapi tidak harus perbedaan tersebut menyebabkan bentrokan-bentrokan yang berakibat pada kekerasan kolektif. Di samping itu, kita umat beragama juga harus sadar, bahwa di tengah gairah umat membangun dan memupuk solidaritas sosial, akan senantiasa muncul/terdapat sekelompok orang yang suka mengail di air keruh, sehingga orang yang berupaya membangun perdamaian dan persaudaraan tercerai berai kembali akibat ulah mereka.

Apabila hal tersebut disadari, saya kira, upaya membangun perdamaian dan persaudaraan sejati antariman, dan antarumat beragama lambat laun akan mendapatkan hasil. Namun, apabila di antara aktivis gerakan perdamaian dan persaudaraan antariman atau agama tidak menyadari secara sungguh-sungguh maka akan dengan mudah diceraiberaikan kembali, hanya dengan gosip-gosip murahan, atau sentilan-sentilan yang bernada sentimental sehingga membangkitkan sikap fanatisme kelompok yang berlebihan. Upaya membangun perdamaian dan persaudaraan sejati yang digagas oleh Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB)

Yogyakarta yang dimotori beberapa tokoh agama dari Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Konghucu akan menemukan titik sentrumnya. Dimana antarumat beragama menggalang kehidupan yang penuh damai, adil, dan sejahtera bersama dengan kelompok-kelompok *interfaith* yang lain, seperti MADIA, GEMARI, PADI KASIH, IPI, dan Interfidei, dan lain-lain.³

Perdamaian dalam hidup jelas merupakan kebutuhan seluruh umat beragama, tanpa kecuali, oleh sebab itu

merupakan "proses pendangkalan iman" seseorang, dengan metode meditasi, misalnya. Pengajian yang diselenggarakan ustadz Jalaluddin Rahkmat, dengan metode sufisme juga mendapatkan perhatian kalangan muslim kota (urban). Kita juga dapat melihat ceramah agama mengenai "metode menjemput kematian", dan lain-lain merebak di kota-kota besar seperti Jakarta, metode praktis belajar al-qur'an 22 jam laris manis peserta adalah bukti bahwa keagamaan seseorang seringkali mengarah pada hal-hal praktis dan sekarang.

³ Gerakan *Interfaith* di Indonesia belakangan mengalami peningkatan tajam. Hal ini disebabkan karena pelbagai factor pendukung. Factor internal dan factor eksternal. Factor internal merupakan factor yang datang dari umat agama-agama itu sendiri sehingga memunculkan gerakan keagamaan yang bersifat inklusif-pluralis, belakangan berkembang menjadi gerakan Islam Liberal dan transformatif. Hal ini ditandai dengan lahirnya NGO-NGO yang berlatarbelakang keagamaan (Islam maupun Kristen) yang bergerak dalam tema-tema *interfaith*. Tema-tema *interfaith* merupakan tema yang tidak membedakan agama sebagai dasarnya, tetapi pada tafsir agama yang lebih toleran, inklusif dan universal. Factor eksternal, disebabkan karena pengaruh ilmuwan-ilmuwan asing yang mengembangkan wacana *interfaith* dan dialog antaragama, baik di Eropa maupun di Amerika. Pengaruh dari

sangat wajar sebetulnya apabila seluruh elemen dalam masyarakat memperjuangkan perdamaian dan persaudaraan sejati. Apabila ada sekelompok umat beragama dengan mengatasnamakan agama, bahkan atas nama Tuhan tetapi enggan memperjuangkan perdamaian dan persaudaraan sejati, saya kira perlu dipertanyakan kembali komitmen keberagamaannya. Mungkin memang mereka beragama, namun bukan pada substansinya, hanya pada tataran ritual simbolik yang memang berbeda-beda, dan banyak mengandung *khilafiyah*. Hal-hal ritual simbolik dari agama-agama semestinya dipahami sebagai "jalan menuju Tuhan", bukan kemutlakan dari ajaran

intelektual Indonesia yang dipelopori oleh Mukti Ali mantan Menteri Agama RI era Soeharto, dengan mendirikan Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama dari jenjang S 1 sampai S 3 di pelbagai IAIN (terutama IAIN Jakarta dan Yogyakarta). Bahkan belakangan perguruan tinggi "sekuler" seperti UGM juga membuka Program Pascasarjana Hubungan Antaragama (*Comparative Religious Studies*). Selain perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta di bawah institusi keagamaan, seperti Universitas Sanata Dharma Yogyakarta membuka Program Pascasarjana Ilmu religi dan Budaya, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, memiliki Program Pascasarjana Agama dan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Muhammadiyah Surakarta, memiliki Program Pascasarjana Agama dan Perubahan Sosial, dan lain-lain. Selain itu, munculnya kelompok *interfaith* juga dipengaruhi oleh krisis multidimensi yang dialami bangsa ini sehingga membutuhkan kerjasama antar-elemen masyarakat untuk mengerjakan penyelesaiannya. Th. Sumartana mengidentifikasi ada empat kelompok *Interfaith* di Indonesia. Kelompok *interfaith* tidak berbasis agama formal, tetapi konsen dengan masalah-masalah *interfaith* seperti

agama yang akan menjadikan umat beragama saling berpandangan ekstrim, fanatis dan tidak bersahabat. Tentang

masalah kemanusiaan (seperti LP3ES, SPES, ISAI); kelompok *Interfaith* berbasis agama tetapi tidak hanya satu agama, seperti MADIA, GEMARI, IPI, FPUB, LINTAS SARA, dan Interfidei; kelompok berbasis agama, tetapi satu agama saja, namun gerakannya untuk semua orang seperti Paramadina. Lembaga ini belakangan memiliki universitas: Universitas Paramadina Mulya, dengan rektor Nurcholish Madjid, merupakan NGO yang sangat penting untuk dikemukakan dalam sosialisasi wacana Islam toleran, inklusif dan dialogis, YBKS, LKIS, P3M, ELSAD, LAKPESDAM; serta gerakan perempuan *Interfaith* seperti KPI, KPP, WCC Rifka Annisa, KPS, dan sebagainya. Tentang contoh-contoh lembaga *Interfaith*, penulis yang memasukkan dengan melihat karakteristik yang dibuat oleh Th. Sumartana. Th. Sumartana, *Tentang Peran Inter-Faith Group di Tengah Kemelut Masyarakat Indoensia Dewasa Ini*, makalah belum diterbitkan untuk Forum Refleksi Antariman di Malino, 23-27 Januari 2002. Mengenai gerakan dan kampanye *Interfaith* dilakukan oleh MADIA di beberapa daerah, (Jakarta, Bandung, Medan dan Manado). Bahkan MADIA telah mencoba mengelaborasi persoalan-persoalan yang muncul dalam dialog antaragama di Empat daerah, seperti persoalan konflik sosial dan peran agama-agama, sebagaimana tertuang dalam buku *Meretas Horison Dialog : Catatan dari Empat Daerah*, editor Trisno S. Sutanto dan Martin Lukito Sinaga, The Ford Foundation, ISAI, dan MADIA, Jakarta, 2001. Sementara itu, Yayasan PADI KASIH, memprogramkan dalam lembaganya untuk tahun 2002-2004 berkampanye tentang pluralisme di tingkat SMU dan pendidik agama, yang difokuskan di Sumatera Barat, Padang. Kegiatan yang dilakukan PADI KASIH seringkali bekerja sama dengan IAIN Imam Bonjol, Pemda dan Depag setempat. Periksa *Swara Damai* PADI KASIH, no II, Oktober 2001, bagian program utama sebagai unggulan PADI KASIH.

masalah ini bisa dilihat kisah Syekh Siti Jenar, serta Islam di Jawa.⁴

Di situlah sebenarnya, dimensi humanis dari teologi agama-agama harus disebarluaskan, bukan ditutup rapat-rapat karena adanya ketakutan terjadinya sinkretisasi dengan agama lain. Ajaran kemanusiaan sebenarnya harus dipahami sebagai bagian terpenting dari seluruh ajaran agama-agama, ketimbang masalah ritual simbolik. Masalah kemanusiaan harus menjadi pijakan bersama umat beragama dalam membangun bangsa yang telah mengalami carut-marut, dan tercabik-cabik oleh kepentingan-kepentingan kelompok antarumat beragama, dan antarpolitik. Apabila dimensi etika kemanusiaan dari agama-agama secara sengaja ditutup rapat, maka yang akan berkembang di tengah masyarakat beragama tidak lain adalah bias-bias otoriterisme seseorang maupun kelompok yang merasa paling berhak menafsirkan agama.

Akibat lanjutan dari sikap otoriterisme adalah adanya keengganan untuk saling belajar, berdialog dan bekerjasama. Dari sana akhirnya tumbuh dengan suburnya para penganut agama yang tidak mepedulikan aspek etika dalam beragama. Pengabaian dimensi etika selama setahun terakhir dapat kita lihat dari bapak-bapak kita di DPR/MPR yang seakan-akan sudah tidak tahu malu lagi untuk senantiasa "berkelahi", demi kekuasaan. Terjadinya skandal mega korupsi dan mega nepotisme adalah wajah yang sangat jelas telah hilangnya dimensi humanis dalam diri orang-orang yang mengaku beragama. Kesaksian-kesaksian palsu tidak segan-segan dilakukan demi keselamatan diri dan kroninya. Bahkan, kesaksian-kesaksian palsu tersebut juga

tidak jarang dikemas dalam terminologi agama, sehingga seakan-akan dibenarkan

⁴ A. Munir Mul Khan, menjelaskan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar tentang *wahdatul wujud* telah menempatkan dirinya dalam perbedaan pandangan yang tajam, khususnya gagasan tentang ketuhanan, hari akhir, syurga-neraka, makna kematian, kehidupan serta fungsi syariah. Masalah ini menjadi perdebatan yang tajam karena selama ini pergumulan tentang Islam lebih didominasi oleh "mazhab syariah", sehingga menempatkan dirinya yang mengajarkan tasawuf berada dalam kajian "islam pinggiran"; Munir Mul Khan, *Syekh Siti Jenar dan Pergumulan Islam Jawa*, Benteng Budaya, Yogyakarta: hlm. 2. Dalam, *Islam Murni dalam Masyarakat Petani*, Munir Mul Khan membagi kelompok Islam penganut Muhammadiyah menjadi empat; Muhammadiyah al-Ikhlash; Muhammadiyah Kiai Dahlan; Muhammadiyah-NU (MU-NU); dan Muhammadiyah Nasionalis atau Marhaenis-Muhammadiyah (Mar-Mud). Muhammadiyah al-Ikhlash merupakan kelompok pengikut Muhammadiyah yang sangat sangat skripturalis-tekstualis dalam memahami dan menerapkan ajaran-ajaran Islam. Kelompok ini seringkali mengecam keras praktek keagamaan yang tidak sama persis dengan praktek keagamaan yang mereka lakukan; Muhammadiyah Kiai Dahlan sedikit berbeda dengan kelompok pertama, sekalipun berusaha mempraktekkan ajaran Islam secara murni dan "konsekuen", tetapi lebih toleran dengan kelompok lain; Muhammadiyah -NU merupakan kelompok Muhammadiyah yang tidak jauh berbeda dalam praktek keagamaannya dengan jamiah NU; sedangkan Marhaenis-Muhammadiyah merupakan kelompok Muhammadiyah yang cenderung apatis terhadap ajaran Islam murni sehingga dapat ditemui mereka ini tidak demikian menghiraukan doktrin-doktrin Islam murni, bahkan juga yang kurang murni. Keempat kategorisasi ini merupakan temuannya dari hasil penelitian di desa Wuluhan, Jember, Jatim yang merupakan disertasinya di program doctor Sosiologi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sementara Mark R. Woodward, membagi Islam Jawa menjadi Islam

oleh agama atau malah oleh Tuhan.⁵

Hal semacam itu jelas sangat memprihatinkan kita, orang yang mengaku beragama, oleh karena mereka yang tidak bertanggung jawab menjadikan umat agama semakin coreng-moreng, berkubang darah dan berkubang dosa. Agama bahkan seakan-akan beralih fungsi sebagai "pembela para bandit" yang berjauhan agama, bukan pembela atas kaum tertindas, marjinal, kaum minoritas dan segala persoalan kemanusiaan yang muncul. Persoalan kemanusiaan seperti banjir yang melanda pelbagai daerah, ketidakadilan atas kaum minoritas, baik agama, suku maupun seks harus benar-benar menjadi perhatian utama umat beragama dalam rangka menjernihkan pandangan dan anggapan orang bahwa agama sebenarnya tidak lain dari sekedar "pembenar" atas kekerasan dan peperangan. Disanalah kemudian umat beragama perlu benar-benar merumuskan agama yang mengutamakan dimensi humanis, ketimbang dimensi formalitasnya.

Kerjasama Antaragama untuk kemanusiaan

Rumusan global tentang humanisasi teologi dalam beragama, sehingga kehidupan umat beragama lebih mencerminkan sifat-sifat kemanusiaan tidak lain adalah bagaimana agama-agama mampu "memberi ruh" atas jalannya sebuah sistem sosial yang tengah berlangsung. Sistem sosial yang saya maksudkan adalah sebuah sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang benar-benar menjunjung tinggi pada penghormatan hak asasi manusia, di mana di dalamnya terdapat hak untuk berbeda agama, hak untuk menentukan pendamping hidup sebagai suami/istri, hak bertempat tinggal, hak menentukan pilihan politik dan sebagainya.

Di sini jelas, bahwa perbedaan agama, suku, jenis kelamin, etnis dan apa saja tidak dipertentangkan, apalagi dijadikan pemicu untuk saling berkelahi, atau memicu disintegrasi bangsa.⁶

santri/Murni dan Islam Sufi. Santri yang saleh adalah seseorang yang mampu memadukan kesalehan yang berpusat pada syariah dengan praktek sufi. Woodward dalam menjelaskan tentang hal ini mengambil mitos walisongo, khususnya Sunan Kalijaga yang berasal dari seorang penjahat, kemudian bisa menjadi seorang wali melalui cinta kepada Allah dan pengabdian kepada guru. Pendek kata, santri adalah perpaduan Islam syariah dan Islam sufistik. Penjelasan mengenai hal ini bisa dilihat dalam karangannya, *Islam Jawa Kesalehan Normatif versus Kebatinan*, LKiS, Yogyakarta, 1999 judul asli *Islam in Java : Normative Piety and Mysticism in The Sultanate of Yogyakarta*, 1989, khususnya bab empat, *Sufisme dan Kesalehan Normatif di Kalangan Santri Tradisional*, hlm. 113-217

⁵ Kasus korupsi yang menimpa Indonesia merupakan contoh dimana orang yang tampak rajin ibadah tetapi berperilaku melanggar larangan agama, sehingga negeri yang katanya religius ini menduduki ranking pertama dalam hal korupsi di Asia, demikian menurut sebuah survei Lembaga Ekonomi dan Politik Asia, *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* Hongkong. (Jawa Pos, 11 Maret 2002)

⁶ Dalam buku yang merupakan hasil Konverensi *Religion and Human Right Project* atau Proyek Agama dan HAM, disana dikemukakan pelbagai isu yang menjadi pembahasan dalam konverensi menyangkut; a) berkaitan dengan hak untuk mendapatkan kebutuhan bahan makanan yang akan mempengaruhi nilai-nilai spiritual dalam hidup; b) persamaan gender dan status perempuan berkaitan dengan dirinya sendiri, seperti masalah seksualitas, perkawinan dan reproduksi, serta kaitannya dengan diskriminasi ekonomi terhadap perempuan; c) kebebasan beragama (berkepercayaan)

Dengan pijakan semacam itu, secara perlahan-lahan, namun bisa dipastikan kehidupan yang penuh kedamaian, persaudaraan sejati, solidaritas sosial, akan terwujud. Harapan akan terjadinya sebuah negara yang berjalan di atas humanisme teologi sehingga mengarah pada pemerintahan yang bersih dan berwibawa menjadi kenyataan. Tetapi jika dimensi humanis dalam beragama tidak pernah dipikirkan dan diupayakan secara sungguh-sungguh, maka harapan munculnya sebuah negara yang diperintah dengan baik dan pemerintahan yang bersih bisa dikatakan hanyalah ilusi belaka. *Good Government* dan *Clean Governance* hanya akan terwujud ketika elit-elit politik yang beragama dalam bersikap dan bertindak mengindahkan dimensi humanisme, karena disitulah sebenarnya substansi agama-agama, dimana hal itu terdapat pada semua agama.

Kita harus yakin bahwa tidak ada satu pun agama yang mengabaikan dimensi humanis, kecuali karena reduksi-reduksi yang dibuat oleh pemeluknya sendiri. Tetapi bertahan pada dogma-dogma semata bahwa agama tidak mengajarkan tentang kekacauan, kekerasan, tetapi mengajarkan tentang kebaikan, kedamaian, sementara terus-menerus tidak berkehendak "memutus sikap eksklusif, dan fanatisme sempit" dalam beragama, saya kira hanya apologi semata dari orang yang mengaku beragama, atau bahkan mengaku saleh dalam beragama. Apabila umat beragama mampu memutus sikap-sikap negatif tersebut, saya optimis peran agama-agama di masa mendatang akan bisa berkembang dimensi humanisnya, sehingga orang beragama benar-benar tidak lagi menakutkan antarsesama pemeluk agama. Disitulah, apabila dimensi kemanusiaan dalam beragama bisa tercipta, maka *social order* yang kita harapkan sebagaimana di

atas saya kemukakan dapat berjalan dengan baik.

Tetapi apabila yang terus berkembang di tengah masyarakat beragama (*religious society*) adalah sikap-sikap yang antikemanusiaan, atau dimensi non etik, maka akan sangat mungkin harapan dari Muhammadiyah dan NU untuk turut memutus citra pejoratif dari agama-agama (terutama Islam) hanyalah isapan jempol belaka. Hal itu merupakan kegagalan terbesar dari umat beragama merumuskan dan menemukan substansi agamanya yang selama ini diyakini akan mampu memberikan kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan dalam hidup. Kerukunan hidup antarumat lintas agama, lintas etnis, pada akhirnya akan sangat sulit dikembangkan, kalau bukan malah tercabik-cabik terus-menerus. Gerakan Islam Liberal

dan kaitannya dengan diskriminasi yang menyangkut identitas agama; d) berkaitan dengan kelas dan kasta yang seringkali berkaitan dengan status kelahiran seseorang; e) berkaitan dengan penduduk asli dan masalah etnis; f) diskriminasi agama terhadap kelompok tertentu seperti gay, homo sek dan lesbian. Bagaimana mencari standar tentang masalah-masalah tersebut dan bagaimana direspon secara bersama dengan melihat relativitas HAM. Hlm. 84, *Religion and Human Right*, editor, John Kelsay and Sumner B Twiss, 1990. Sementara Abdullahi Ahmed An-Naim, dalam pembongkaran atas Syariah menyatakan bahwa; pemberlakuan HAM sekalipun memiliki relativitas berdasarkan kultur dan karakter masing-masing negara harus tetap mengacu pada nilai-nilai universalitas HAM itu sendiri. Hukum-hukum agama kalau hendak dipraktekkan jangan sampai bertentangan dengan kondisi real masyarakat dan kenyataan sejarah yang mendahului munculnya hukum tersebut. *Dekonstruksi Syariah I*, LKIS, Yogyakarta: 1994. hal. 326-346.

dan Moderat yang digagas kalangan muda Muhammadiyah dan NU dapat dirujuk pada apa yang dilakukan oleh JIL (Jaringan Islam Liberal Komunitas Utan Kayu-ISAI) yang menggagas wacana Islam toleran dan inklusif.⁷

Apa yang telah dilakukan ketua PBNU ketika bertemu presiden George W. Bush atas undangan Dewan Keamanan Amerika dengan mengingatkan Amerika untuk tidak menggunakan cara-cara kekerasan (represif) dalam menangani aksi kekerasan atas nama agama, karena Islam Indonesia bersifat moderat, kultural dan domestik, sehingga tidak kenal jaringan terorisme Internasional, (Jawa Pos, 8 Februari, 2002) akan berbuah bagi umat Islam Indonesia khususnya, dan umat beragama pada umumnya. Umat beragama harus didorong lebih menggunakan dimensi kemanusiaan dalam bertindak ketimbang menggunakan cara-cara kekerasan.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian serius dari umat beragama adalah munculnya stigmatisasi dan *stereotype* yang terus berkembang di kalangan masing-masing umat beragama. Apa yang dilakukan PP. Muhammadiyah dengan mengundang ahli-ahli Islam dan pengamat tentang Islam Indonesia merupakan langkah yang pantas didukung, sehingga kesalahpahaman, kengerian terhadap Islam maupun Barat lama-lama akan terkikis, tidak mengalami akumulasi yang berbuah pada adanya kebencian antaragama.

Berkaitan dengan gempuran tentara Israel terhadap markas Yasser Arafat, pemimpin PLO, mendapat kecaman banyak pihak, termasuk Sri Paus, Paus Yohanes II pada perayaan Misa Paskah di Vatikan. Paus mengecam peristiwa penyerangan tersebut sebagai peristiwa berdarah yang telah menjerumuskan "tanah Suci Timur

Tengah menjadi Tanah kengerian dan keputusan". (Kompas, 1 April 2002).

Apa yang telah dilakukan ketua PBNU KH. Hasyim Muzadi, PP Muhammadiyah, dan pimpinan tertinggi agama Katolik merupakan perbuatan yang pantas didukung dan kemudian dikerjakan secara bersama sehingga perdamaian dunia akan dapat tercapai, bukan pertumpahan darah yang mengatasnamakan agama. Agama sudah seharusnya dirumuskan kembali untuk dapat "menangkap" problem-problem sosial yang muncul di tengah masyarakat kita, sehingga orang beragama menjadi bermanfaat. Beragama yang tidak mampu "merespon" secara kritis problem sosial yang muncul sebenarnya hanya akan merendahkan hakikat agama itu sendiri. Apalagi jika agama hanya untuk membenarkan kegiatan politik yang berjangka pendek dan tidak memihak rakyat banyak.

Korupsi dan kemiskinan adalah salah satu problem sosial yang menimpa sebagian warga negara, sebetulnya merupakan problem bersama yang penyelesaiannya tidak mungkin bersifat segregatif-gradualistik. Korupsi dan

⁷ Kurzman misalnya, mencoba mengategorisasikan Islam liberal dari sisi shariah. Kurzman membagi dalam tiga; *Liberal Shariah, Silent Shariah, dan Interpreted Shariah*. Charles Kurzman, ed, *Liberal Islam : A Sourcebook*, Oxford University Press, New York: 1998. Sementara, Hefner memberikan keterangan bahwa organisasi keagamaan NU dan Muhammadiyah akan memiliki peran yang penting dalam pembentukan civil Islam di Indonesia. Dimana gerakan civil Islam merupakan bagian dari proses demokratisasi Indonesia, di tengah munculnya faksi-faksi politik dan keagamaan di Indonesia. Robert W. Hefner, *Civil Islam Muslim and Democratization in Indonesia*, Princenton University Press, 2000.

kemiskinan bangsa ini memang sangat mengerikan, sebab kemiskinan bukan saja karena problem kultural, sehingga pernah ada tesis mitos pribumi malas seperti dikemukakan Sayyid Husein Alatas seorang sosiolog dari Malaysia, yang juga memperkenalkan sosiologi korupsi pada kita. Problem kemiskinan kita diperparah dengan konstruksi struktural, sehingga kelompok marjinal akan selamanya marjinal, dan semakin hari semakin miskin. Miskin yang turun-temurun. Di sini hemat saya, kita harus melakukan rekonstruksi ulang atas paham teologi kita, sehingga pandangan tentang syirik, kafir, beriman, surga dan neraka dapat diterjemahkan ulang. Disini etnografi tentang siapa yang sebenarnya pantas masuk surga dan neraka perlu dilakukan.

Yang sama pentingnya adalah merumuskan sebuah teologi korupsi, yang secara cermat mampu menjadikan problem kultural dan struktural ini menjadi problem teologis. Kita tahu bahwa korupsi di negeri mayoritas muslim ini sudah sangat akut, sehingga pemberantasan korupsi hanya dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu, seperti NU, Muhammadiyah dibantu beberapa NGO's hampir dapat dipastikan tidak mungkin. Pemberantasan korupsi harus dimulai "dari Istana" demikian kata Amien Rais suatu ketika, pada saat Pilpres 5 Juli belum berlangsung. Artinya, pemberantasan korupsi tidak mungkin hanya dikerjakan dari atas mimbar, oleh seorang tokoh agama sekalipun. Tetapi, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara serempak, oleh agama apapun. Disini koalisi antaragama untuk memberantas korupsi di negeri ini hemat saya menemukan relevansinya. Namun, koalisi antaragama untuk memberantas korupsi hanya akan menjadi pekerjaan."proyek" manakala diantara mereka berhenti bekerja disebabkan

berhentinya kucuran dana untuk kegiatan advokasi di tingkat lapangan. Apa yang sudah dikerjakan NU, Muhammadiyah, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha di Yogyakarta akan menjadi catatan sejarah dalam memberantas korupsi ketika mereka benar-benar mampu bekerja tanpa arus tergantung pada "dana proyek".

Oleh sebab itulah, hemat saya kita benar-benar harus mampu merumuskan semacam "teologi baru" dalam menghadapi penyakit korupsi yang demikian ganas. Korupsi kita ketahui saat ini sudah gentayangan dari level paling bawah sampai level paling tinggi. Sebab itulah, tidak bisa dihindarkan lagi menjadikan korupsi sebagai musuh besar agama-agama, yang posisinya bisa disamakan dengan kufur nikmat dan bahkan "keluar dari iman". Ini artinya, paradigma teologis kita harus berubah, dari teologi konservatif, menjadi teologi progresif yang berpihak pada ketertindasan dan kemungkaran sosial.

Dari sini kita akan menemukan semacam *the new meaning* berdasarkan pada kunci-kunci *hermeneutik* yang digali dari noktah-noktah kitab suci atau petunjuk-petunjuk keagamaan. Kemiskinan karena itu harus direpon secara sosial, sehingga yang perlu dikembangkan adalah sebuah ajarah teologi yang bersifat transformatif-emansipatoris. Kemiskinan tidak bisa dilihat dari kacamata teologi jabariyah, yang lebih menyerahkan persoalan kehidupan pada "takdir" semata. Bahkan, kita perlu "menabrak tradisi" teologi jabariyah yang mengakibatkan masyarakat religius terbang bersama mimpi untuk menunggu perubahan nasib.

Mungkin inilah saat yang tepat, antarumat beragama untuk bersama-sama tanpa memandang dari agama apa, memulai kembali merumuskan kerangka dan

gerakannya yang lebih bersifat transformatif, sehingga perlahan-lahan akan tercipta sebuah bangunan masyarakat sipil yang kuat, toleran, responsif dan demokratis. Tanpa adanya kerjasama dan rumusan baru tentang keagamaan kita, agaknya tantangan dan sekaligus provokasi yang ada di hadapan kita tentang kematian dan tidak adanya kehadiran Tuhan dimasa depan akan menjadi kenyataan.

Beberapa hal yang bisa dikerjakan oleh umat beragama, khususnya elit agama di antaranya adalah mereka harus tampil *sebagai pengayom*, bukan sebagai provokator untuk terjadinya suatu gerakan yang tidak manusiawi atau melawan kemanusiaan. Elit agama sudah seharusnya berperan sebagai orang yang tenang, memperjuangkan perdamaian dunia, dan menyemaikan benih-benih kemanusiaan untuk semua umat manusia; elit agama harus tampil *sebagai mediator atau fasilitator*, yaitu orang yang mampu mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik atau bermusuhan, bukan malah menjadi tokoh utama yang mengibarkan bendera perang antaragama. Untuk bisa berperan demikian, elit agama sebaiknya tidak usah masuk dalam sebuah partai politik tertentu. Apabila seorang elit agama "terjun" ke politik praktis, biasanya akan merusak komitmen perjuangan bersama demi kesejahteraan umat manusia. Kita ketahui kebiasaan yang terjadi apabila elit agama masuk sebuah partai politik tertentu, cara berpikir, bersikap dan bertindak tidak lagi bisa diterima dan membela semua pihak, tetapi malahan mencerca orang yang dianggap sebagai "lawan politiknya".

Dengan berperan menjadi dua hal ini, saya kira dasar-dasar kerjasama yang telah dilakukan oleh ketiga tokoh umat beragama diatas, akan menjadi pijakan untuk

terjadinya rekonsiliasi antarumat beragama, sekaligus rekonsiliasi nasional. Dengan demikian kekhawatiran akan kematian dan ketidakhadiran Tuhan di masa depan tidak terjadi karena umatnya mampu melakukan kerja kemanusiaan yang menjadi "pekerjaan Tuhan". Mungkinkah itu dilakukan, semua tergantung apakah umat beragama mampu merumuskan teologinya secara kontekstual?

Penutup

Bangsa ini sesungguhnya bangsa yang kaya, tetapi mengapa kemiskinan melanda warga negara, sehingga sebagian warga negara harus menjadi kuli di negara lain, di kawasan Asia maupun Timur Tengah. Di Asia banyak warga negara bangsa ini menjadi TKI/TKW di Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Taiwan, Jepang, China, Korea bahkan Thailand. Kita jelas tidak menghendaki bangsa ini menjadi bangsa kuli, yang harus mengabdikan dibawah ketiak negara lain. Kita tahu betapa sengsarnya nasib para TKI/TKW yang mengadu nasib di Negara seperti di Malaysia, Arab Saudi, Thailand dan Hongkong. TKI/TKW sudah miskin diperas pula oleh PJTKI dan agen-agen tenaga kerja swasta. Masih untung jika TKI/TKW hanya diperas materialnya, tetapi menjadi semakin sengsara mereka biasanya diperas materi dan kehormatannya, baik dijual oleh agen tenaga kerja maupun oleh majikannya.

Orang miskin dan pinggirannya tidak sanggup berbuat banyak, sementara negara tampak tenang-tenang saja, tidak segera bertindak, paling banter menegur PJTKI dan negara yang majikannya menyiksa buruhnya, tetapi perlindungan yang jelas atas mereka sampai sekarang tidak pernah ada kejelasan, sekalipun telah ada undang-undangnya. Sekali lagi kemiskinan memang

memprihatinkan, namun tidak bisa diselesaikan hanya sekedar prihatin. Harus ada *political will* untuk memberantas kemiskinan. Kemiskinan kita bisa dikategorikan kemiskinan absolut sebab tiap tahun melonjak dari 16 juta jiwa saat ini kira-kira 40 juta jiwa. Kasus TKW Nirmala Bonet yang disiksa di Malaysia harus menjadi pelajaran berharga bagi umat beragama, bahwa jeratan ekonomi acapkali membawa pada kesengsaraan, sekalipun disana dikehendaki adanya perubahan nasib pada dirinya sendiri.

Jangan-jangan semua problem itu bermula dari adanya korupsi yang merajalela, sehingga distribusi ekonomi menjadi tidak merata. Distribusi ekonomi berputar pada kelompok *inner cycle* yang merupakan *sinterclas* semata. Korupsi akhirnya benar-benar menjadi bagian tak terisahkan dari kehidupan kita, sebab moralitas yang dikembangkan adalah moralitas "mengamankan asset" ekonomi yang dianggap menjadi bagian miliknya. Korupsi sudah tidak menjadi perbuatan jahat, tetapi melawan korupsi seakan-akan melawan perbuatan benar. Bangsa kita benar-benar mengalami disorientasi nilai, sebagai bangsa religius. Ini problem akut yang sekarang melilit bangsa ini. Kita harus berani melepaskan diri dari jeratan korupsi ini sehingga mampu berdiri kembali secara tegak dan sejajar dengan bangsa lain.

Fenomena maraknya korupsi yang terjadi di beberapa daerah, terutama yang menimpa para anggota dewan dan pengurus partai politik adalah bukti betapa moralitas kita sangat rendah. Mereka sebenarnya menjerumuskan dirinya pada lembah yang paling sengsara, namun fenomena semacam itu, nyaris tidak terbendung oleh hukum. Ini barangkali juga karena lemahnya

perangkat hukum di negeri ini. Selain itu, agama di negeri ini tampak sekali lebih berfungsi sebagai *lips service* ketimbang sebagai "panduan moral" untuk hidup yang lebih bermartabat. Panduan moral religius ini terhalang oleh tarikan-tarikan materialisme yang lebih menggurkan, sekalipun hanya sesaat.

Pertanyaan akhir yang dapat kita ajukan, mungkinkah agama-agama menjadikan korupsi, dan kemiskinan sebagai musuh bersama agama, sehingga agama tidak sebatas menjadi gerakan moral dalam memberantas korupsi dan kemiskinan, tetapi gerakan pelayanan yang konkret di tengah masyarakat *dhu'afa*, marjinal-miskin. Jika agama mampu berperan seperti itu, maka kita masih bisa berharap pada agama untuk hadir di muka bumi ini. Selain itu, kebangkitan Indonesia pada masa sekarang dan mendatang memang tidak bisa hanya diserahkan pada satu kelompok agama, tetapi harus dipikul bersama-sama, sebab dalam ntokah kitab suci agama-agama, problem sosial kemasyarakatan adalah sangat jelas menjadi musuh bersama agama-agama. ●

Daftar Pustaka

- Armstrong, Karen, 2000, *The Battle for God*, New York.
- Juergensmeyer, Mark, 2000, *Terror in The Mind of God*, California: University of California Press.
- Sutanto S., Trisno dan Martin Lukito Sinaga (editor), 2001, *Meretas Horison Dialog : Catatan dari Empat Daerah*, Jakarta: The Ford Foundation, ISAI, dan MADIA.

